

DRAFT LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PEMBICARAAN TINGKAT I RUU TENTANG PEMASYARAKATAN
DENGAN PEMERINTAH

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/ tanggal : Selasa/ 17 September 2019
Waktu : 19.50 – 21.19 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Erma Suryani Ranik, S.H., M.H./ Ketua Panja
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan 26 (dua puluh enam) orang anggota dari
52 (lima puluh dua) Anggota Komisi III DPR RI 9 (sembilan) Fraksi
dari 9 (sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja RUU tentang Pemasyarakatan dengan Pemerintah dibuka pukul 19.50 WIB oleh Ketua Panja RUU tentang Pemasyarakatan, Erma Suryani Ranik, S.H., M.H. dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Laporan Panja RUU Pemasyarakatan
- Pengambilan Keputusan Tingkat I
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. KESIMPULAN

1. Ketua Panja RUU tentang Pemasyarakatan menyampaikan Laporan Panja RUU tentang Pemasyarakatan dengan materi muatan baru sebagai berikut:
 - a. penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
 - b. perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
 - c. pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong,

- kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas;
- d. pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan;
 - e. penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
 - f. pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan;
 - g. pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan;
 - h. pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - i. pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan;
 - j. pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan; dan
 - k. pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
2. Ketua Panja RUU tentang Pemasyarakatan menyampaikan beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan di Panitia Kerja dan Timus/Timsin antara lain yaitu:
- a. Asas yang melandasi pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
 - b. Fungsi Pemasyarakatan.
 - c. Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan
 - d. Intelijen Pemasyarakatan
 - e. Petugas Pemasyarakatan
 - f. Pengawasan
 - g. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat
3. Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mengenai RUU tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:
- Fraksi PDIP menyatakan persetujuan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Golkar menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasyarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Gerindra menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasyarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Demokrat menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasyarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.

- Fraksi PAN menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PKB menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi PPP menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Nasdem menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
 - Fraksi Hanura menyatakan persetujuan terhadap RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
4. Menkumham atas nama Presiden Republik Indonesia membacakan sambutan singkat Presiden dan menyampaikan persetujuan terhadap RUU tentang Pemasarakatan untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 5. Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pemasarakatan untuk dilanjutkan dalam Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna dalam waktu dekat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.19 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA PANJA,

ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.H.
A-446